

# PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN DAN KOTA JAWA TIMUR

Bagus Yudha Yuswara  
*bagusyudhayuswara@gmail.com*  
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## ABSTRACT

*This research aimed to analyze and examine the General Allocation Grant, Special Allocation Fund, and Capital Expenditures on the Gross Regional Domestic Product (GRDP). While, the population was all cities in East Java, with 190 samples from 38 cities during 2013-2017. The research was quantitative moreover, the data were secondary, in the form on budget realization report which was presented in the result of east java audit board report (General Allocation Grant, Specific Allocation Fund, Capital Expenditure) and Statistics Indonesia (GRDP per capita) of cities in East Java during 2013-2017. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded, as follows: 1) General Allocation Grant had positive and significant effect on the GRDP of East Java, 2) Specific Allocation Fund had positive but insignificant effect on the GRDP OF East Java, 3) Capital Expenditure had positive and significant effect on the GDRP of East Java.*

*Keywords: GDRP, DAU, DAK, capital expenditure*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah sampel penelitian sebesar 38 Kabupaten atau Kota dengan periode penelitian 2013-2017 sehingga diperoleh total sampel 190. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang berupa laporan realisasi anggaran yang disajikan dalam laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur (dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal) dan Badan Pusat Statistik (produk domestik regional bruto perkapita) kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 hingga 2017. Pengujian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto pada Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur; 2) Dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto pada Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur; 3) Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto pada Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: PDRB, DAU, DAK, Belanja Modal

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Potensi keuangan daerah yang tidak seimbang akan menimbulkan adanya kesenjangan keuangan yang dapat mengakibatkan

kesenjangan pembangunan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pun mempunyai peran penting terhadap kesuksesan pertumbuhan ekonomi nasional. Tiap provinsi, termasuk Provinsi Jawa Timur diharuskan memenuhi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, target perencanaan ekonomi yang terpenuhi dan dapat menyelesaikan masalah pembangunan yang ada di daerah otonom, karena di tiap daerah telah mempunyai kebebasan mengelola kekayaan daerahnya sendiri yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat daerahnya. Provinsi Jawa Timur dengan keuntungan geografis dan sumber daya alam melimpah yang dimiliki dapat dijadikan modal untuk meningkatkan produk domestik regional bruto yang selanjutnya diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi kita juga harus memperhatikan indikator-indikatornya diantaranya terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Alasan digunakannya PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi daerah yaitu ; 1) PDB/PDRB adalah jumlah dari nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan dari seluruh aktivitas perekonomian; 2) PDB/PDRB dihitung atas dasar aliran barang-barang dan jasa-jasa dalam serta faktor-faktor produksi dalam periode tertentu; 3) PDB/PDRB menyangkut hasil aktivitas ekonomi keseluruhan dalam suatu wilayah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan kemampuan dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat di daerah.

Setiap daerah memiliki potensi dan kemampuan keuangan yang berbeda untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam mengatasi ketimpangan fiskal, pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Astria, 2014). Salah satu dana transfer adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004, dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Proporsi dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara provinsi dan kabupaten atau kota.

Selain itu Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomi yang panjang. Wijanarko (2015) berpendapat bahwa dengan adanya pengalokasian dana alokasi khusus diharapkan dapat mempengaruhi produk domestik regional bruto. Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur publik, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Erlina dan Rasdianto (2013) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas ekonomi kemudian diharapkan dapat mendorong produk domestik regional bruto yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik sekali untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh dana

alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal terhadap produk domestik regional bruto. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data laporan keuangan *audited* pada pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun anggaran 2013-2017.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ? 2) Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ? 3) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur ?. Menurut rumusan masalah di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk: 1) Menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. 2) Menguji pengaruh dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. 3) Menguji pengaruh belanja modal terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup yang digunakan penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur dimana data dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal didapatkan dari laporan realisasi anggaran *audited* yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Periode yang digunakan dalam penelitian ini mulai tahun 2013-2017. Data produk domestik regional bruto diperoleh dari [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

## TINJAUAN TEORITIS DAN PERKEMBANGAN HIPOTESIS

### Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU no. 32 tahun 2004). Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 66 Ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (UU no. 33 tahun 2004). Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin informatif. Untuk itu, APBD dalam bentuk yang baru terdiri dari tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas beberapa komponen, yaitu:

#### 1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang

dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Komponen pendapatan daerah terdiri atas:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan daerah menghimpun sumber - sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

b) Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU no. 33 tahun 2004). Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

c) Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup: hibah/bantuan dari pemerintah, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari teknis kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian, bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten / kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan. Komponen belanja daerah terdiri atas :

a) Belanja Langsung

Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi: belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang/jasa, dan belanja modal. Belanja tersebut dilaksanakan untuk menjalankan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan.

b) Belanja Tidak Langsung

Belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi: belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah adalah penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan.

### Dana Alokasi Umum

Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 pasal 1, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dari dana alokasi umum ini untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Dana alokasi umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan

pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

### **Dana Alokasi Khusus**

Menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 pasal 1, dijelaskan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 38-39 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dijelaskan bahwa besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina dan Rasdianto, 2013). Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa besaran nilai pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau bangun aset. Sesuai dengan amanat peraturan presiden nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, secara keseluruhan jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari belanja daerah.

### **Produk Domestik Regional Bruto**

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi akan menambah penghasilan masyarakat di waktu tertentu. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah adalah PDRB yang menunjukkan nilai tambah yang didapatkan dari kegiatan produksi ekonomi. PDRB adalah untuk mengukur jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan PDRB sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. PDRB perkapita dipengaruhi oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan jumlah penduduk, dengan kata lain PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar, masyarakat cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. PDRB perkapita merupakan hasil pembagian Produk Domestik Regional Bruto dari tiap kabupaten/kota dengan jumlah penduduk pada wilayah tersebut. Apabila menyangkut tingkat kesejahteraan penduduk data PDRB perkapita lebih komprehensif dan relevan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB karena secara simultan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.

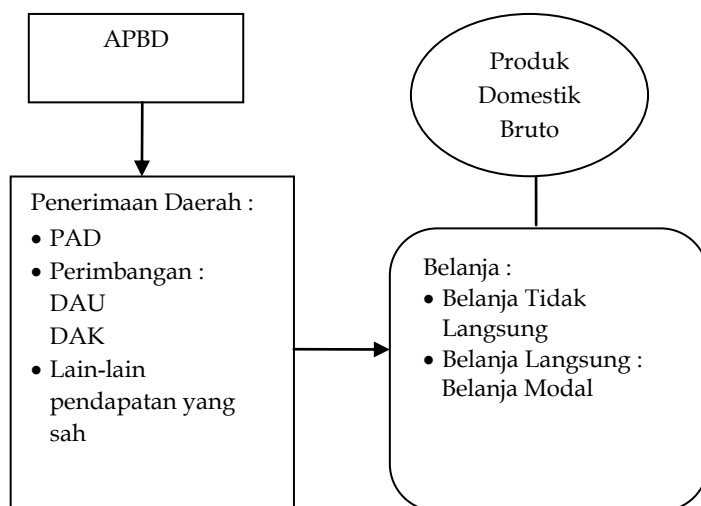
**Penelitian Terdahulu**

Penelitian Mafahir dan Soelistyo (2017) dengan judul Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 8 kabupaten dan 2 kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan negatif terhadap PDRB. Hasil analisis juga ditemukan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, demikian juga pada dana alokasi khusus yang memiliki efek positif yang tidak signifikan terhadap PDRB.

Penelitian Bangun (2009) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Pulau Sumatera sebanyak 101 kabupaten dan 31 kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap PDRB perkapita, dana alokasi umum berpengaruh signifikan negatif terhadap PDRB perkapita dan sementara pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB perkapita.

Penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2018) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal terhadap Produk Domestik Bruto Provinsi Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung sebanyak 14 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB, dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB, belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB.

**Kerangka Pemikiran**



**Gambar 1**  
**Rerangka Pemikiran**

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Dana alokasi umum yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi dapat meningkatkan PDRB di suatu daerah dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah melalui peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh masyarakat dan terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan dalam roda perekonomian. Dana alokasi umum yang diberikan pemerintah kepada setiap daerah tidak sama hal ini berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Hananto (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto. Hal yang sama ditemukan oleh Mafahir dan Soelistiyo (2017) dalam penelitiannya yang membuktikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Berdasarkan tinjauan secara teoritis maupun empiris diatas maka disusun hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan, pengadaan, peningkatan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah dengan umur ekonomis panjang. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga diharapkan dapat menarik para pelaku ekonomi untuk berinvestasi yang akan mendorong produk domestik regional bruto. Pengalokasian dana alokasi khusus kepada daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat berdasarkan kriteria tertentu, dengan diarahkannya pemanfaatan dana alokasi khusus untuk kegiatan pembangunan yang akan mendorong aktifitas perekonomian dan percepatan pembangunan yang kemudian meningkatkan produk domestik regional bruto di daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mafahir dan Soelistiyo (2017) menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap PDRB. Penelitian Hananto (2018) juga menemukan bahwa dana alokasi khusus positif dan tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Berdasarkan tinjauan secara teoritis maupun empiris diatas maka disusun hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

#### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan peningkatan pengeluaran pemerintah, khususnya belanja modal diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi atau PDRB. Hananto (2018) menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Rahmadhani (2019) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Berdasarkan tinjauan secara teoritis maupun empiris diatas maka disusun hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Belanja modal berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausalitas. Menurut Sugiyono (2016: 62) penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Menurut Kuncoro (2013: 10) penelitian kausalitas merupakan penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016: 11) metode kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Populasi dalam penelitian ini Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, lalu data dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan realisasi anggaran *audited* yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan data produk domestik regional bruto bersumber badan pusat statistik yang diunduh melalui situs web resmi yang beralamat [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara peneliti mengambil sampel atau contoh yang representatif dari populasi yang tersedia (Sanusi, 2014: 88). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pengambilan yang tidak secara acak tetapi sesuai tujuan atau target dengan pertimbangan kriteria tertentu. Berdasarkan metode tersebut, maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Kabupaten dan kota yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur periode 2013 - 2017. 2) Kabupaten dan kota yang secara berturut-turut menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013 - 2017 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

### Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (dokumen) yang terpublikasi. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi, lembaga atau sumber-sumber lain yang relevan data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini (Sugiyono, 2016). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *documented method*, yaitu pengumpulan data dan informasi tertentu melalui data laporan realisasi anggaran *audited* Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur pada periode 2013-2017 dan badan pusat statistik sehingga dapat dianalisis guna menemukan suatu hasil dan kesimpulan.

### Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk domestik regional bruto, sedangkan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal sebagai variabel independen. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai definisi operasional masing-masing variabel: 1) Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan



keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dalam penelitian ini dilihat dari realisasi dana alokasi umum tahun 2013-2017 pada laporan keuangan audited pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. 2) Dana alokasi khusus adalah dana yang ditetapkan setiap tahun dalam APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Dana alokasi khusus dalam penelitian ini dilihat dari realisasi dana alokasi khusus tahun 2013-2017 pada laporan keuangan *audited* pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. 3) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dalam penelitian ini dilihat dari total seluruh belanja modal pada laporan keuangan audited pemerintahan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. 4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar. PDRB perkapita dipengaruhi oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan jumlah penduduk, dengan kata lain PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah. Produk domestik regional bruto perkapita dalam penelitian ini dilihat melalui laju PDRB perkapita Kota dan Kabupaten di Jawa Timur periode tahun 2013-2017.

## **Teknik Analisis Data**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran tentang variabel penelitian. Menurut Sugiyono (2016: 126) analisis statistik deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran pada objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang belaku umum dari data tersebut. Yang termasuk dalam analisis data statistik deskriptif adalah penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, mean dan skor deviasi.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Menurut Ghazali (2013: 133) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai pola distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas ada dua cara yang digunakan yaitu analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov*.

#### **Uji Multikolinieritas**

Pada penelitian ini menggunakan uji multikolinieritas yang bertujuan untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi dengan variabel independen (Ghozali, 2013: 137). Jika tidak ada korelasi, maka model regresi tersebut dikatakan baik. Uji multikolinieritas pada penelitian ini dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) yaitu sebagai berikut: a) Jika nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. b) Jika nilai *tolerance* < 0,1 dan nilai VIF > 10 maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (periode sebelumnya) (Santoso, 2010: 241). Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson (DW-Test), dimana dalam pengambilan keputusan melihat berapa jumlah sampel yang diteliti yang kemudian dilihat angka ketentuannya pada tabel Durbin Watson. Nilai Durbin Watson (DW) harus dihitung terlebih dahulu, kemudian dibandingkan dengan nilai batas atas ( $dU$ ) dan nilai batas bawah ( $dL$ ) untuk berbagai nilai  $n$  (jumlah sampel) dan  $k$  (jumlah variabel bebas). Kriteria pengujian Durbin Watson sebagai berikut : Jika angka statistik D-W di bawah  $-2$  berarti ada autokorelasi positif, jika diantara  $-2$  sampai  $+2$  berarti tidak ada autokorelasi, jika diatas  $+2$  berarti ada autokorelasi negatif.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut homoskedastisitas dan jika *variance* berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada berbetuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka telah terjadi homoskedastisitas (Ghozali, 2013: 145).

### Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Menurut Ghozali (2013: 155), analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan *dependent variable* (terikat) dengan satu atau lebih *independent variable* (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai *independent variable* yang diketahui. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$PDRB = \alpha + \beta_1 DAU + \beta_2 DAK + \beta_3 BM + \epsilon_i$$

### Uji Kelayakan Model

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis ini pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dilihat pada *adjusted Rsquare*. *Adjusted Rsquare* merupakan *Rsquare* yang telah disesuaikan dan biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan menjelaskan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2013: 97). Dalam penelitian ini, mengukur pengaruh variabel bebas: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) terhadap variabel terikat: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin kuat kemampuan model regresi yang diperoleh untuk menerangkan kondisi yang sebenarnya.

### Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pada pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah variabel independen pada model mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen dan bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut layak atau tidak layak. Berikut kriteria pengujian : a) Jika nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sehingga model regresi layak. b) Jika nilai sig > 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sehingga model regresi tidak layak.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji *t-test*. Menurut (Ghozali, 2013: 98) uji statistik *t* pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari  $\alpha$  (asumsi tarif nyata 0,05) maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut adalah kriteria pengujian ini: a) Jika nilai sig < 0,05, maka hipotesis diterima yang menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto. b) Jika nilai sig > 0,05, maka hipotesis ditolak yang menunjukkan variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan secara individual terhadap produk domestik regional bruto.

## ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Produk domestik regional bruto adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun, lalu PDRB perkapita adalah gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah. Dana alokasi umum adalah dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke pemerintahan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dimana pemerintah daerah dalam kewenangannya bebas untuk menggunakan dana tersebut. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang selanjutnya diharapkan akan dapat mempertinggi intensitas kegiatan ekonomi.

### Sampel Penelitian

Penelitian ini sampel data yang digunakan adalah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur dengan periode penelitian antara 2013 sampai dengan 2017. Secara administratif, provinsi ini terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota. Provinsi yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Pulau Bali, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini data penelitian didasarkan pada laporan keuangan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur dengan tahun penelitian selama lima tahun yaitu 2013-2017. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 1**  
**Proses Pemilihan Sampel**

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah Sampel LK
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	38	38	38	38	38	190
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>Jumlah Sampel Akhir</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>190</b>

**Sumber : Data BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur diolah, 2020**

Pada Tabel 1 tersebut, peneliti menggunakan sampel sebanyak 38 dengan laporan keuangan periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling* dalam proses seleksi pemilihan sampel, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 190 unit sampel. Data-data tersebut diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan BPS. Berikut ini merupakan daftar nama pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti :

**Tabel 2**  
**Daftar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur**

No	Kabupaten/Kota	No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bangkalan	20	Kabupaten Pasuruan
2	Kabupaten Banyuwangi	21	Kabupaten Ponorogo
3	Kabupaten Blitar	22	Kabupaten Probolinggo
4	Kabupaten Bojonegoro	23	Kabupaten Sampang
5	Kabupaten Bondowoso	24	Kabupaten Sidoarjo
6	Kabupaten Gresik	25	Kabupaten Situbondo
7	Kabupaten Jember	26	Kabupaten Sumenep
8	Kabupaten Jombang	27	Kabupaten Trenggalek
9	Kabupaten Kediri	28	Kabupaten Tuban
10	Kabupaten Lamongan	29	Kabupaten Tulungagung
11	Kabupaten Lumajang	30	Kota Batu
12	Kabupaten Madiun	31	Kota Blitar
13	Kabupaten Magetan	32	Kota Kediri
14	Kabupaten Malang	33	Kota Madiun
15	Kabupaten Mojokerto	34	Kota Malang
16	Kabupaten Nganjuk	35	Kota Mojokerto
17	Kabupaten Ngawi	36	Kota Pasuruan
18	Kabupaten Pacitan	37	Kota Probolinggo
19	Kabupaten Pamekasan	38	Kota Surabaya

**Sumber : Data BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur diolah, 2020**

### **Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan banyaknya data yang digunakan, nilai minimum dan maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai produk domestik regional bruto, pendapatan dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2013 sampai 2017. Hasil dari analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 22, dapat ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 3  
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
PDRB	190	11.977	408.663	44.036,34	56.200,22
Dana Alokasi Umum	190	83.588.340	1.709.892.845	897.872.585,13	297.213.847,78
Dana Alokasi Khusus	190	7.125.690	506.688.728	151.936.439,99	125.471.764,65
Belanja Modal	190	67.646.320	2.517.891.658	392.955.303,82	293.851.135,65
Valid N (listwise)	190				

Sumber : Data hasil output SPSS diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 dapat dijelaskan:

#### 1. Produk domestik regional bruto

Nilai minimum produk domestik regional bruto perkapita diperoleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2013 sebesar Rp 11.977.000. Sedangkan produk domestik regional bruto perkapita dengan nilai maksimum sebesar Rp 408.663.000 diperoleh Kota Kediri pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) dari produk domestik regional bruto sebesar Rp 44.036.340 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 56.200.220. nilai standar deviasi lebih besar menunjukkan perbedaan antar data produk domestik regional bruto cukup tinggi.

#### 2. Dana Alokasi Umum

Nilai minimum dana alokasi umum diperoleh Kabupaten Pasuruan pada tahun 2014 sebesar Rp 83.588.340.000. Sedangkan dana alokasi umum dengan nilai maksimum sebesar Rp 1.709.892.845.000 diperoleh Kabupaten Jember pada tahun 2016. Nilai rata-rata (*mean*) dari dana alokasi umum sebesar Rp 897.872.585.130 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 297.213.847.780. Nilai standar deviasi lebih kecil menunjukkan perbedaan antar data dana alokasi umum cukup rendah.

#### 3. Dana Alokasi Khusus

Nilai minimum dana alokasi khusus diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2015 sebesar Rp 7.125.690.000. Sedangkan Dana Alokasi Khusus dengan nilai maksimum sebesar Rp 506.688.726.785 diperoleh Kabupaten Malang pada tahun 2017. Nilai rata-rata (*mean*) dari dana alokasi khusus sebesar Rp 151.936.439.990 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 125.471.764.650. Nilai standar deviasi lebih kecil menunjukkan perbedaan antar data dana alokasi khusus cukup rendah.

#### 4. Belanja Modal

Nilai minimum belanja modal sebesar Rp 67.646.320.365 diperoleh Kota Mojokerto pada tahun 2013. Sedangkan belanja modal dengan nilai maksimum diperoleh Kota Surabaya pada tahun 2017 sebesar Rp 2.517.891.658.246. Nilai rata-rata (*mean*) dari belanja modal sebesar Rp 392.955.303.820 dan nilai standar deviasi sebesar Rp 293.851.135.650. Nilai standar deviasi lebih kecil menunjukkan perbedaan antar data belanja modal cukup rendah.

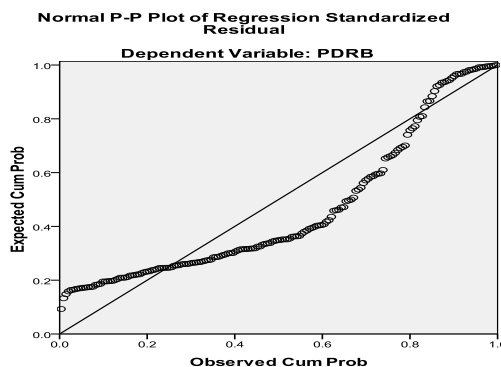
### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang dianalisis telah memenuhi syarat dari keempat uji asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedasitas. Perhitungan uji asumsi klasik tersebut sebagai berikut:

#### Uji Normalitas

Pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik dapat menggunakan histogram dan *normal probability plot*. Dalam penelitian ini, grafik yang digunakan untuk pengujian normalitas data adalah grafik *Normal Probability Plot* atau yang bisa disebut grafik *P-plot*. Pada grafik *P-plot* distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas, sedangkan distribusi dari data digambarkan dengan *ploting*. Jika data berdistribusi normal maka garis yang menggambarkan data akan mengikuti atau merapat ke garis diagonalnya. Gambar 2 berikut ini menyajikan grafik *P-plot* yang dapat

menggambarkan distribusi data. Berdasarkan hasil pengolahan data SPSS uji normalitas didapat grafik sebagai berikut:



Gambar 2  
Grafik P-plot

Sumber : Data hasil output SPSS diolah, 2020

Berdasarkan Gambar 2 hasil uji normalitas data dengan menggunakan *P-plot* grafik terlihat bahwa penyebaran titik-titik mengikuti arah garis diagonal, namun titik-titik menyebar jauh disekitar garis diagonal. Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal atau dengan kata lain model regresi layak dipakai karena memenuhi salah satu asumsi yang telah disebutkan sebelumnya yaitu penyebaran titik-titik yang mengikuti garis diagonal.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2013: 154). Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4  
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		190
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.92837926
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.208
	Negative	-.200
Kolmogorov-Smirnov Z		2.835
Asymp. Sig. (2-tailed)		.151

Sumber : Data hasil output SPSS diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 diatas hasil pengujian normalitas terhadap 190 Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Asymp.sig.(2-tailed)* sebesar 0,151 lebih besar dari 0,05.

### Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas adalah dengan menggunakan nilai *tolerance value* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas adalah nilai *tolerance value* diatas 0,10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dibawah 10.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Dana Alokasi Umum	.727	1.375
Dana Alokasi Khusus	.756	1.323
Belanja Modal	.729	1.745

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Data hasil output SPSS diolah, 2020

Dari hasil yang telah dianalisis dan diuji yang menunjukkan pada Tabel 5 diatas, dapat diketahui bahwa variabel independen terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance value* diatas 0,10.

**Uji Autokorelasi**

Menurut Suliyanto (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut (*times-series*) atau ruang (*cross section*). Jika terjadi korelasi maka dinamakan problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson yang dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	1.851

a. Predictors: (Constant), BM, DAK, DAU

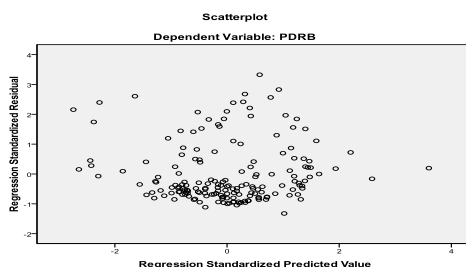
b. Dependent Variable: PDRB

Sumber : Data hasil output SPSS diolah, 2020

Pada Tabel 6 dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai DW sebesar 1,851 terletak diantara -2 sampai +2 maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat varian variabel pada model regresi yang tidak sama (*konstan*) atau yang bisa disebut homokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dapat menggunakan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati grafik *scatterplot*. Jika *scatterplot* disajikan pada Gambar 3 berikut ini:



**Gambar 3**  
**Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas**  
Sumber: Data hasil output SPSS diolah, 2020

Berdasarkan tampilan pada grafik *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari data yang diolah dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7  
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	41475.527	6930.684		5.984	.000
	DAU	2.045	8.497	.199	2.407	.017
	DAK	8.749	4.769	.149	1.835	.068
	BM	3.117	1.150	.253	2.711	.007

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data hasil output SPSS diolah, 2020

Pada Tabel 7 di atas dapat diamati bahwa hasil pengujian memperoleh angka persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = 41475.527 + 2.045\text{DAU} + 8.749\text{DAK} + 3.117\text{BM} + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa koefisien dari dana alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) bertanda positif sehingga variabel - variabel tersebut mempunyai pengaruh searah dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa : a) Konstanta Regresi. Besarnya nilai konstanta adalah 41475.527 Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel bebas yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) = 0, maka besarnya variabel terikat yaitu produk domestik regional bruto sebesar 41475.527. b) Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum (DAU) ( $b_1$ ). Besarnya koefisien  $b_1$  adalah 2.045 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Dana Alokasi Umum (DAU) dengan produk domestik regional bruto. Hal ini berarti jika variabel dana alokasi umum naik sebesar satu satuan maka produk domestik regional bruto akan naik sebesar  $b_1$  yaitu 2.045 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. c) Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) ( $b_2$ ). Besarnya koefisien  $b_2$  adalah 8.749 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan produk domestik regional bruto. Hal ini berarti jika variabel dana alokasi khusus naik sebesar satu satuan maka produk domestik regional bruto akan naik sebesar  $b_2$  yaitu 8.749 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan. d) Koefisien Regresi Belanja Modal (BM) ( $b_3$ ). Besarnya koefisien  $b_3$  adalah 3.117 yang menunjukkan arah hubungan positif (searah) antara Belanja Modal (BM) dengan produk domestik regional bruto. Hal ini dapat diartikan jika variabel belanja modal naik sebesar satu satuan maka produk domestik regional bruto akan naik sebesar  $b_3$  yaitu 3.117 dengan asumsi variabel yang lainnya konstan.

### Goodness of Fit (Uji Kelayakan Model)

Menurut Ghozali (2013: 97), pengujian *Goodness of Fit* digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian. Model pengujian yang diukur adalah nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai statistik uji F. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dapat dijelaskan sebagai berikut :



### Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diketahui dari nilai koefisien determinasi. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variansi perubahan pada variabel dependen. Berikut ini hasil pengukuran koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 8 :

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.368 <sup>a</sup>	.300	.186	29707.101

a. Predictors: (Constant), BM, DAK, DAU

b. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data hasil output SPSS diolah, 2020

Nilai koefisiensi determinasi atau *Rsquare* dalam penelitian ini sebesar 0.300 atau sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) selama 2013-2017 mempengaruhi produk domestik regional bruto adalah sebesar 30% dan sisanya sebesar 70% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

### Uji F

Uji F bertujuan untuk menguji variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel produk domestik regional bruto. Kriteria model yang digunakan adalah sebagai berikut: a) P-value < 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada penelitian. b) P-value > 0,05 menunjukkan bahwa uji model ini tidak layak untuk digunakan pada penelitian.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.774	3	5.912	6.699	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1.597	186	8.825		
	Total	1.775	189			

a. Dependent Variable: PDRB

b. Predictors: (Constant), BM, DAK, DAU

Sumber: Data hasil output SPSS diolah, 2020

Berdasarkan hasil output SPSS pada Tabel 9 diatas diketahui nilai  $F_{hitung}$  sebesar 6.699 dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Nilai F memberikan hasil yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Modal (BM) berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, hal ini membuktikan bahwa uji model ini layak untuk digunakan pada uji analisis selanjutnya.

### Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal terhadap produk domestik regional bruto. Dimana tingkat signifikansi  $\leq 0,05$  maka dapat disimpulkan variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 10 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

	Model	B	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
1	(Constant)	41475.527	.000	
	Dana Alokasi Umum	2.045	.017	Diterima
	Dana Alokasi Khusus	8.749	.068	Ditolak
	Belanja Modal	3.117	.007	Diterima

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: Data hasil output SPSS diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji t dan tingkat signifikansi diatas maka dapat diperoleh koefisien determinasi parsial dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Pengujian hipotesis pertama (Dana Alokasi Umum)

H<sub>1</sub>: dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

Pengaruh variabel dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai B sebesar 2.045 dengan tingkat signifikan 0.017 nilai signifikan tersebut < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan H<sub>1</sub> diterima yang berarti bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi dana alokasi umum akan semakin tinggi produk domestik regional bruto dan sebaliknya semakin rendah dana alokasi umum akan semakin rendah produk domestik regional bruto.

2) Pengujian hipotesis kedua (Dana Alokasi Khusus)

H<sub>2</sub>: dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

Pengaruh variabel dana alokasi khusus terhadap produk domestik regional bruto berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai B sebesar 8.749 dengan tingkat signifikan 0.068 nilai signifikan tersebut > 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H<sub>2</sub> ditolak yang berarti bahwa variabel dana alokasi khusus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi dana alokasi khusus akan semakin tinggi tetapi tidak signifikan (sangat lemah) pula produk domestik regional bruto dan sebaliknya semakin rendah dana alokasi khusus akan semakin rendah tetapi tidak signifikan (sangat lemah) produk domestik regional bruto.

3) Pengujian hipotesis ketiga (Belanja Modal)

H<sub>3</sub>: belanja modal berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

Pengaruh variabel belanja modal terhadap produk domestik regional bruto berdasarkan hasil regresi menunjukkan nilai B sebesar 3.117 dengan tingkat signifikan 0.007 nilai signifikan tersebut < 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H<sub>3</sub> diterima yang berarti bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi belanja modal akan semakin tinggi produk domestik regional bruto dan sebaliknya semakin rendah belanja modal akan semakin rendah produk domestik regional bruto.

## PEMBAHASAN

Uraian berikut ini tentang pembahasan tentang hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dari hasil perhitungan uji t diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai pengaruh berikut:

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat nilai produk domestik regional bruto kabupaten dan kota di Jawa Timur. Bertambahnya dana alokasi umum maka akan semakin meringankan kebutuhan suatu daerah. Misalnya, semakin banyak dana alokasi umum, maka semakin banyak pula kebutuhan pemerintah daerah yang terbayarkan seperti kebutuhan pendanaan belanja pegawai, melaksanakan fungsi layanan dasar umum dan membangun infrastruktur. Peran dana alokasi umum sangat signifikan, karena dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah yang optimal dan tepat sasaran yang akan berdampak pada produk domestik regional bruto.

Pemerintah daerah lebih memprioritaskan pada bidang - bidang yang strategis, seperti pengadaan infrastruktur, pengadaan sarana prasarana pelayanan publik dan melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang nantinya akan menstimulasi para investor untuk menanam modalnya di daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Ketika investor masuk maka roda perekonomian akan berjalan cepat yang mengakibatkan arus barang dan jasa di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur meningkat. Adanya pengaruh yang signifikan dari dana alokasi umum terhadap produk domestik regional bruto memberikan indikasi bahwa kota / kabupaten di Jawa Timur masih banyak yang belum mandiri dalam hal keuangan yaitu karena pendapatan asli daerahnya belum dapat mencukupi kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur, maupun pelayanan publik secara maksimal, sehingga masih adanya ketergantungan pada dana perimbangan dari pusat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hananto (2018) dan Mafahir dan Soelistiyo (2017) dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap produk domestik regional bruto. artinya jika dana alokasi umum yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi maka produk domestik regional bruto di daerah tersebut akan meningkat pula.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Dari hasil pengujian didapatkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Dengan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semakin besar dana alokasi khusus yang diterima oleh daerah maka akan semakin meningkat tetapi tidak signifikan produk domestik regional bruto kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah memang dialokasikan khusus untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah seperti pembiayaan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana. Dana alokasi khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dana alokasi khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah atau kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan kementerian terkait misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain-lain. Berarti tidak boleh disalahgunakan untuk kegiatan diluar ketentuan. Selain itu dana alokasi khusus tidak signifikan karena sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan dan pengalokasian dana alokasi khusus tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong produk domestik regional bruto seperti infrastruktur jalan, jembatan atau objek wisata. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Hananto (2018), menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto pemerintahan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto**

Dari pengujian variabel belanja modal menghasilkan nilai positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto. Artinya semakin tinggi nilai belanja modal maka semakin tinggi nilai produk domestik regional bruto kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pemerintah daerah memperhatikan pengelolaan belanja modal dengan baik untuk menunjang investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada 38 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Pemerintah daerah melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap belanja modal dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga belanja modal dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Kabupaten dan kota di Jawa Timur menggunakan belanja modal yang sifatnya produktif yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah dalam belanja modal dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan output barang dan jasa. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan akan semakin tinggi, dan pada gilirannya terjadi peningkatan produk domestik regional bruto.

Belanja modal pemerintah daerah berperan dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus dalam perekonomian. Peningkatan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, jalan, jaringan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan mendorong kelancaran usaha ekonomi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan merangsang para investor untuk menanam modal. Kualitas infrastuktur, jalan, jaringan dan transportasi akan membantu usaha ekonomi masyarakat untuk meningkatkan produksinya, jika fasilitas memadai maka kemampuan memproduksi tidak terhambat dengan pelayanan publik sehingga output yang dihasilkan dapat terus meningkat. Meningkatnya belanja modal juga diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya sehingga meningkatkan produk domestik regional bruto. Pada akhirnya perbaikan sarana dan prasarana dapat meningkatkan output dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian hasil penelitian ini senada dengan penelitian Rahmadhani (2019) dalam penelitiannya yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Hasil uji kelayakan model menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, sehingga layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. 2) Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena setiap dana alokasi umum yang diterima pemerintah daerah akan ditunjukan untuk belanja pemerintah daerah dengan optimal dan tepat sasaran. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan pada bidang - bidang yang strategis, seperti pengadaan infrastruktur, pengadaan sarana prasarana pelayanan publik dan melaksanakan fungsi layanan dasar umum yang nantinya akan menstimulasi para investor untuk menanam modalnya di daerah dan memberikan pelayanan yang lebih

baik lagi. Ketika investor masuk maka roda perekonomian akan berjalan cepat yang mengakibatkan arus barang dan jasa di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur meningkat sehingga meningkatkan produk domestik regional bruto. 3) Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap produk domestik regional bruto kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena dana alokasi khusus yang diterima pemerintah daerah memang dialokasikan khusus untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan daerah seperti pembiayaan kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana yang membutuhkan dana. Selain itu dana alokasi khusus tidak signifikan karena sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi bukan menjadi prioritas pemerintah daerah yang bersangkutan pada tahun berjalan dan pengalokasian dana alokasi khusus tidak secara langsung berhubungan dengan faktor-faktor yang secara langsung mendorong produk domestik regional bruto seperti infrastruktur jalan, jembatan, atau objek wisata. 4) Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto kabupaten dan kota di Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dalam belanja modal dilakukan evaluasi, pengkajian dan dilaksanakan dengan baik. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas diberbagai sektor, meningkatkan aktifitas atau produktifitas masyarakat diharapkan akan semakin tinggi, dan merangsang para investor pada gilirannya terjadi peningkatan produk domestik regional bruto. Peningkatan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, jalan, jaringan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan mendorong kelancaran usaha ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan merangsang para investor untuk menanam modal.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: 1) Diketahui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh secara bersama-sama terhadap produk domestik regional bruto kota dan kabupaten di Jawa Timur, oleh karena itu dalam usaha untuk meningkatkan produk domestik regional bruto maka cara yang dapat dilakukan adalah melalui pemberian dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal secara tepat, efisien dan efektif yang dirancang atau dianggarkan dengan sungguh-sungguh. 2) Pemerintah kabupaten atau kota diharapkan mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi di daerah untuk dapat meningkatkan produk domestik regional bruto, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3) Pemerintah daerah dalam penganggaran lebih memprioritaskan pada bidang - bidang yang strategis, seperti pengadaan infrastruktur jalan, pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang nantinya akan menstimulasi para investor untuk menanam modalnya di daerah. Ketika investor masuk maka roda perekonomian akan berjalan cepat yang mengakibatkan arus barang dan jasa di kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur meningkat. 4) Masyarakat diikut sertakan dalam pengambilan keputusan sehingga bersinergi dengan pemerintah yang dapat meringankan pemerintah dalam pengawasan di lapangan dan dalam prioritas bidang yang akan diambil oleh pemerintah daerah. Nantinya dana-dana yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat tepat guna dan tepat sasaran untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga meningkatkan arus barang dan jasa pada masyarakat itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astria, S. A. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12 (1) : 42-54.
- Bangun, R. A. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap PDRB Perkapita Di Pulau Sumatera. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Brama Ardian. Medan.
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hananto. 2018. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal Terhadap Produk Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Kuncoro. M. 2013. *Mudah Memahami Dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mafahir, A. dan A. Soelistyo. 2017. Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi* 1 (1) : 143-152.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 1. *Dana Alokasi Umum*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. *RPJMN Tahun 2010-2014*. 20 Januari 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Rahmadhani, F. K. 2019. Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Terhadap PDRB Perkapita Di Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Santoso, S. 2010. *Statistik parametrik*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS*. Edisi Kesatu. Andi Yogyakarta. Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 38-39. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Wijanarko, D. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2012-2013. Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.